



ANALISIS PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DENGAN LOKASI GEOGRAFIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Rizqi Maulidan Prasetyo Aji, Mutiara Tresna Parasetya¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study examines how the financial condition of local governments influences compliance in presenting financial reports via the Internet, with the geographical features of the region acting as a moderating variable. This study aims to analyze the effect of local government wealth on Internet Financial Reporting (IFR) compliance with geographical location as a moderating variable.

The study used financial report data and websites from 528 local governments in Indonesia that met the research criteria during the period January–April 2026, using a purposive sampling technique. Hypothesis testing was conducted using multiple logistic regression analysis with the help of SPSS 26.0.

Based on the results of the study, simultaneously the variables of local government wealth, geographical location, moderating variables, type of local government, and size of local government influence Internet Financial Reporting (IFR) compliance. However, partially only the type of local government has a significant effect on IFR, while local government wealth, geographical location, size of local government, and the interaction of moderation do not show a significant effect.

Keywords: Internet Financial Reporting (IFR), regional wealth, geographical location, financial reporting compliance, local government.

PENDAHULUAN

Praktik penyebaran informasi keuangan perusahaan kepada publik melalui *Internet* dikenal sebagai *Internet Financial Reporting* (IFR). Perkembangan IFR menjadi salah satu media yang tercepat dan efisien dalam memberitahukan berbagai informasi terkait perusahaan. Hanifa dan Rashid (2005) menjelaskan informasi perusahaan yang disajikan saat ini sedang mengalami pergeseran dari sistem pelaporan berbasis kertas (*paper-based reporting system*) menuju sistem pelaporan tanpa kertas (*paper-less reporting system*).

Pemaparan laporan keuangan *Internet* di sektor pemerintah merupakan salah satu langkah pemerintah agar transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah semakin meningkat kepada publik.

Penelitian tentang IFR di sektor pemerintahan Indonesia sangat menarik karena pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai layanan publik berbasis *e-government* melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang beragam, misalnya kekayaan daerah. Pada tahun 2018, hanya 8 provinsi (24%) yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Jumlah ini meningkat menjadi 18 provinsi (53%) pada tahun 2020 tetapi sedikit menurun menjadi 17 provinsi (50%) pada tahun 2021. Pada tahun 2022, 24 provinsi (71%) telah mempublikasikan laporan keuangan di situs *web*. Secara keseluruhan, dari tahun 2018 hingga 2022, 49% pemerintah provinsi di Indonesia menggunakan situs *web* resmi untuk IFR. (Desrina dkk., 2024).

¹ Corresponding author

Tingkat kepatuhan *Internet Financial Reporting* (IFR) mungkin dipengaruhi secara positif oleh kekayaan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh daerah yang mempunyai jumlah aset maupun tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Kepatuhan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dipengaruhi oleh lokasi geografis pemerintah daerah, karena perbedaan kondisi wilayah seperti tingkat kemajuan infrastruktur teknologi informasi, akses *Internet*, serta kedekatan dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dapat memengaruhi kemampuan dan motivasi hasil publikasi laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan mengacu pada penelitian Suprianto dan Salim (2024), mengenai apakah kekayaan pemerintah daerah memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan *Internet* dengan geografis daerah sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan yaitu data yang digunakan oleh Suprianto dan Salim (2024) menggunakan data dari tahun 2019 sampai 2021 sedangkan penelitian ini hanya menggunakan data satu tahun yaitu 2024 yang dilakukan untuk menguji apakah hasil hipotesisnya akan sama atau berbeda.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menyajikan acuan yang meliputi landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka kerja, dan pengembangan hipotesis.

Teori Institusional

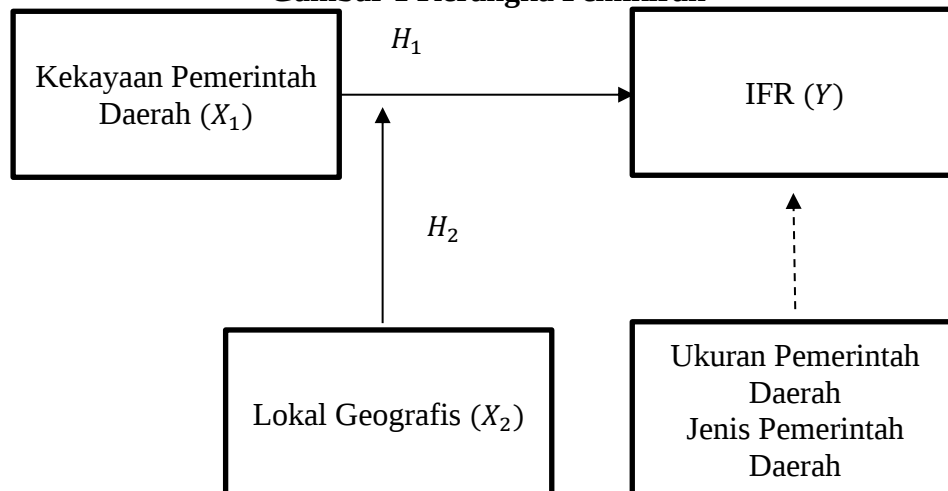
Teori institusional dikemukakan oleh John W. Meyer dan Brian Rowan pada tahun 1977, kemudian dikembangkan oleh Paul J. DiMaggio dan Water W. Powell pada tahun 1983. Berdasarkan pendapat Meyer & Rowan (1977), teori institusional menjelaskan bahwa legitimasi sosial lebih diutamakan daripada efisiensi teknis dalam pembentukan perilaku dan struktur organisasi. Sementara itu, menurut DiMaggio & Powell (1983), teori institusional menekankan jika perilaku organisasi dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mendapatkan legitimasi dari lingkungan eksternal.

Dalam konteks sektor publik, teori institusional menekankan bahwa pemerintah daerah cenderung menyesuaikan kebijakan dan praktik pelaporannya, termasuk kepatuhan *Internet Financial Reporting* (IFR), untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat, pemerintah pusat, serta lembaga pengawas.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap kepatuhan IFR

Kekayaan pemerintah daerah mencerminkan tingkat kemakmuran dan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Semakin besar kekayaan suatu daerah, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga pemerintah daerah terdorong untuk mengungkapkan informasi keuangan secara lebih terbuka melalui *Internet Financial Reporting* (IFR). Dalam perspektif teori institusional, pemerintah daerah yang memiliki aset atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar menghadapi tekanan koersif, normatif, dan mimetik yang lebih kuat untuk memperoleh serta mempertahankan legitimasi publik melalui praktik tata kelola yang transparan. Oleh karena itu, penerapan IFR tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi penyampaian informasi, tetapi juga sebagai respons terhadap tuntutan lingkungan institusional. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Syofyani dan Dwirama (2019) menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi IFR, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif mengungkapkan informasi keuangan melalui website resmi sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap transparansi. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis:

H1: Kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan IFR.

Pengaruh letak geografis pemerintah daerah terhadap hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dengan IFR

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, letak geografis dipandang sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dan pengungkapan IFR. Pemerintah daerah yang berada di Pulau Jawa umumnya memiliki tingkat kesejahteraan, infrastruktur teknologi, dan kemampuan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dibandingkan daerah di luar Jawa, sehingga lebih mampu mengelola serta menyebarluaskan informasi keuangan secara efektif. Selain didukung oleh sumber daya yang lebih memadai, pemerintah daerah di Pulau Jawa juga menghadapi tekanan institusional yang lebih besar untuk menerapkan praktik transparansi guna memperoleh legitimasi publik. Temuan penelitian Rosmeli dan Nurhayani (2014), Setiawan dan Michael (2020), serta Wardhanie (2012) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan kapabilitas teknologi yang lebih baik berkontribusi terhadap peningkatan penerapan IFR. Atas penjabaran diatas, hipotesis yang diusulkan guna penelitian ini, yakni:

H2: Letak geografis pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dengan IFR.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan variabel yang dipakai pada penelitian serta penafsiran teknis masing-masing variabel, serta informasi tentang populasi serta sampel penelitian, berbagai bentuk serta sumbernya, dan teknik dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Lingkup populasi dalam kajian ini meliputi semua entitas pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia. Proses pemilihan sampel diterapkan melalui metode *purposive sampling*, sebuah teknik yang mendasarkan penentuan sampel pada kriteria spesifik yang sebelumnya sudah digariskan oleh peneliti. Penerapan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait tingkat ketaatan pemerintah daerah dalam mempublikasikan laporan keuangan mereka melalui situs web resmi sepanjang tahun 2024. Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria

dalam penentuan sampelnya, yaitu:

1. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada periode 2024.
2. Pemerintah daerah yang memiliki *website* yang dapat dijangkau dan aktif.
3. Pemerintah daerah yang memiliki informasi utuh mengenai variabel-variabel yang digunakan pada penelitian

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah, Mod yang merupakan variabel interaksi antara Ke dan geografis lokal serta variabel dependen *internet financial reporting*. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel dan Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen <i>Internet Financial Reporting</i>	Y	Variabel dummy “1” untuk pemerintah daerah yang laporan finansialnya dapat ditemukan dan diakses melalui situs <i>web</i> dalam format apa pun. Sebaliknya, “0” diberikan kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya tidak tersedia atau tidak dapat diakses di situs <i>web</i> manapun
Variabel Independen Kekayaan Pemerintah Daerah	X1	Rasio antara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total populasi yang mendiami wilayah
Geografis Lokal	X2	Variabel dummy dengan nilai “1” merupakan definisi pemerintah daerah yang berlokasi di Pulau Jawa, sedangkan nilai “0” merupakan definisi pemerintah daerah di luar Pulau Jawa
Moderasi	X1 x X2	Variabel interaksi antara kekayaan pemerintah daerah dan geografis lokal (Ke × Geo)
Ukuran Pemerintah Daerah	X3	Total aset pemerintah daerah
Jenis Pemerintah Daerah	X4	Variabel dummy, di mana angka ‘1’ ditetapkan untuk pemerintah provinsi, ‘2’ untuk pemerintah kabupaten, dan ‘3’ untuk pemerintah kota

Model Penelitian

Pada penelitian ini menerapkan metode perhitungan statistik atau kuantitatif. Proses analisis data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 26. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi logistik berganda, dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil

temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel. Sampeling penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria khusus. Pemerintah daerah yang dijadikan sampel harus memiliki data yang lengkap serta mempunyai *website* resmi yang aktif dan dapat diakses selama periode pengumpulan data, yaitu dari Januari hingga April 2026. Dengan kriteria tersebut, sampel yang terpilih diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian secara optimal. Langkah-langkah pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Pemerintah daerah di Indonesia	528
2.	Pemerintah daerah yang mempublikasikan IFR	450
3.	Pemerintah daerah yang tidak mempublikasikan IFR	78
Jumlah sampel penelitian		528

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dari 528 observasi pemerintah daerah yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Variabel Internet Financial Reporting (IFR) memiliki 528 observasi dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1 karena diukur menggunakan variabel dummy. Nilai rata-rata sebesar 0,85 menunjukkan bahwa sekitar 85% pemerintah daerah dalam sampel telah menerapkan atau memenuhi kriteria Internet Financial Reporting. Standar deviasi sebesar 0,355 mengindikasikan bahwa variasi penerapan IFR antar pemerintah daerah relatif rendah.

Variabel kekayaan pemerintah daerah (KE) memiliki 528 observasi dengan nilai minimum sebesar 24.621.784 dan maksimum sebesar $1,0 \times 10^{13}$. Nilai rata-rata sebesar $3,90 \times 10^{12}$ dan standar deviasi sebesar $2,346 \times 10^{12}$ menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam sampel memiliki tingkat kekayaan yang relatif tinggi dengan variasi yang cukup besar antar daerah.

Variabel jenis pemerintah daerah (*TYPE*) memiliki 528 observasi dengan nilai minimum 1 dan maksimum 3, yang menunjukkan adanya tiga kategori jenis pemerintah daerah. Nilai rata-rata sebesar 2,10 dengan standar deviasi sebesar 0,488 mengindikasikan bahwa sebagian besar sampel berada pada kategori tertentu dengan tingkat variasi yang relatif rendah.

Variabel ukuran pemerintah daerah (*LNSIZE*) memiliki 528 observasi dengan nilai minimum sebesar 2.941.339 dan maksimum sebesar $3,0 \times 10^{12}$. Nilai rata-rata sebesar $2,66 \times 10^{12}$ serta standar deviasi sebesar $7,799 \times 10^{11}$ menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dalam sampel relatif besar dengan variasi yang cukup beragam, namun tidak terlalu ekstrem.

Variabel letak geografis (*GEO*) memiliki 528 observasi dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1 karena diukur menggunakan variabel dummy. Nilai rata-rata sebesar 0,22 menunjukkan bahwa sekitar 22% pemerintah daerah termasuk dalam kategori yang diberi kode 1, sedangkan sisanya berada pada kategori kode 0. Standar deviasi sebesar 0,416 mengindikasikan adanya variasi karakteristik geografis antar pemerintah daerah dalam sampel penelitian.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KE	528	24621784	1.E+13	3.90E+12	2.346E+12
GEO	528	0	1	.22	.416
TYPE	528	1	3	2.10	.488
LNSIZE	528	2941339	3.E+12	2.66E+12	7.799E+11
IFR	528	0	1	.85	.355
Valid N (listwise)	528				

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan Histogram Residual dan One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test. Berdasarkan histogram, distribusi residual tidak mengikuti pola kurva normal secara sempurna. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan kriteria pengujian, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		528
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30210273
Most Extreme Differences	Absolute	.380
	Positive	.249
	Negative	-.380
Test Statistic		.380
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan Runs Test. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,007. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$), maka residual tidak bersifat acak, sehingga terdapat indikasi autokorelasi dalam data.

Tabel 5
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.10498
Cases < Test Value	264
Cases >= Test Value	264
Total Cases	528
Number of Runs	234
Z	-2.701
Asymp. Sig. (2-tailed)	.007

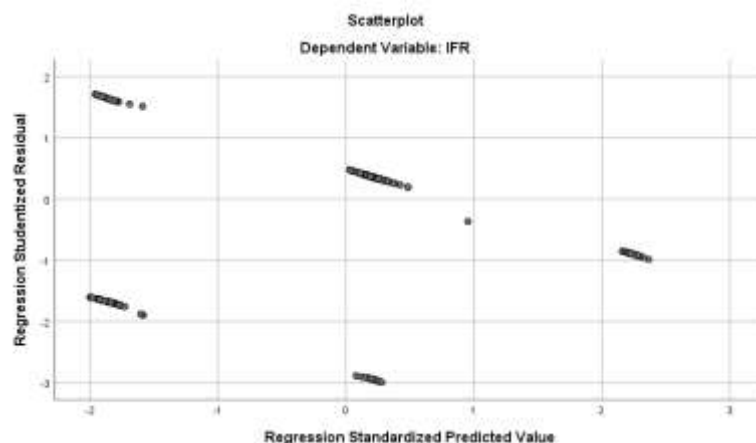
Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Scatterplot antara nilai Regression Studentized Residual dan Regression Standardized Predicted Value. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model.

Berdasarkan scatterplot, titik-titik residual terlihat menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, atau bergelombang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas, sehingga model memenuhi asumsi homoskedastisitas

Gambar 2 Scatterplot Dependent Variable: IFR



Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Uji Multikolinearitas

Selain menggunakan Collinearity Diagnostics, multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghazali (2005), model regresi tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance antara 0,253–0,996, yang berarti lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF berkisar antara 1,002–3,951, yang seluruhnya lebih kecil dari 10. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel MODERASI sebesar

3,951, namun masih berada di bawah batas yang ditentukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel Kekayaan Daerah (KE), Letak Geografis (GEO), Moderasi, Tipe Pemerintah Daerah (TYPE), dan Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE), sehingga seluruh variabel layak digunakan dalam model penelitian (Ghozali, 2005).

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.660	.064		25.965	.000		
	KE	-3.005E-15	.000	-.020	-.477	.633	.800	1.249
	GEO	-.045	.062	-.052	-.713	.476	.259	3.855
	MOD	1.127E-14	.000	.058	.784	.434	.253	3.951
	TYPE	-.380	.028	-.522	-13.773	.000	.965	1.036
	LNSIZE	1.538E-14	.000	.034	.906	.365	.996	1.004

a. Dependent Variable: IFR

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,277 dan Adjusted R Square sebesar 0,270.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,270 menunjukkan bahwa variabel Kekayaan Daerah (KE), Letak Geografis (GEO), Moderasi, Tipe Pemerintah Daerah (TYPE), dan Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE) mampu menjelaskan variasi Internet Financial Reporting (IFR) sebesar 27,0%. Sementara itu, sisanya sebesar 73,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.277	.270	.303

a. Predictors: (Constant), LNSIZE, KE, TYPE, GEO, MOD

b. Dependent Variable: IFR

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Uji Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji ANOVA pada Tabel 8, diperoleh nilai F hitung sebesar 40,064 dengan nilai signifikansi 0,000.

Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka model regresi dinyatakan layak (fit) dan variabel Kekayaan Daerah (KE), Letak Geografis (GEO), Moderasi, Tipe Pemerintah Daerah (TYPE), dan Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR). Dengan demikian, model penelitian dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.436	5	3.687	40.064	.000 ^b
	Residual	48.041	522	.092		
	Total	66.477	527			

a. Dependent Variable: IFR

b. Predictors: (Constant), LNSIZE, KE, TYPE, GEO, MOD

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Analisis Regresi Berganda dan Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Internet Financial Reporting (IFR) secara parsial. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Kekayaan Daerah (KE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,633, Letak Geografis (GEO) sebesar 0,476, Moderasi sebesar 0,434, dan Ukuran Pemerintah Daerah (LNSIZE) sebesar 0,365. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga masing-masing variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR.

Sementara itu, variabel Tipe Pemerintah Daerah (TYPE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Tipe Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap IFR. Nilai koefisien regresi sebesar -0,380 menunjukkan arah pengaruh yang negatif, artinya perbedaan tipe pemerintah daerah cenderung menurunkan tingkat IFR sebesar 0,380 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Berganda dan Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.660	.064		25.965	.000
	KE	-3.005E-15	.000	-.020	-.477	.633
	GEO	-.045	.062	-.052	-.713	.476
	MOD	1.127E-14	.000	.058	.784	.434
	TYPE	-.380	.028	-.522	-13.773	.000
	LNSIZE	1.538E-14	.000	.034	.906	.365

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2026

Dari hasil pengujian yang termuat pada tabel 9 maka persamaan model regresi yaitu:

$$Y = 1,660 + (-3,005E^{-15}X_1) + (-0,045X_2) + 1,127E^{-14}X_1.X_2 + 1,538E^{-14}X_4 + (-0,380X_5) + \varepsilon$$

Penjelasan:

Nilai konstanta sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model memiliki nilai log odds positif terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) ketika seluruh variabel independen dianggap konstan.

Variabel kekayaan pemerintah daerah (KE) memiliki koefisien sebesar -3.005E-15 dengan nilai signifikansi 0,633 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan IFR. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IFR tidak dapat diterima. Sehingga **H1 ditolak**.

Variabel *TYPE*, ditemukan koefisien regresi sebesar -0,522 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya di bawah 0,05, ini menunjukkan bahwa *TYPE* memiliki dampak yang signifikan pada IFR. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan pengaruh *TYPE* terhadap IFR dapat diterima.

Variabel *LNSIZE* tercatat dengan nilai signifikansi sebesar 0,365, yang lebih besar dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memberikan dampak signifikan terhadap IFR. Oleh karena itu, hipotesis tersebut ditolak.

Variabel *MOD* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,434. Mengingat nilai ini di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IFR. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa letak geografis mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dan IFR tidak dapat diterima. Sehingga **H2 ditolak**.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini menyajikan simpulan dari studi yang sudah dilaksanakan berdasarkan uji hipotesis sebelumnya. Lebih lanjut, keterbatasan dan saran dalam penelitian dijabarkan dalam studi ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kekayaan pemerintah daerah, letak geografis, variabel moderasi, tipe pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kepatuhan Internet Financial Reporting (IFR). Namun, secara parsial hanya variabel tipe pemerintah daerah yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap IFR. Sementara itu, kekayaan pemerintah daerah, letak geografis, dan ukuran pemerintah daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, variabel moderasi juga tidak mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dan IFR. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik tipe pemerintah daerah menjadi faktor yang lebih menentukan dalam tingkat transparansi pelaporan keuangan melalui Internet dibandingkan faktor kekayaan, letak geografis, maupun ukuran pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan data dalam satu periode pengamatan sehingga belum dapat menggambarkan perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Kedua, nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang memengaruhi kepatuhan Internet Financial Reporting (IFR). Ketiga, pengukuran variabel hanya didasarkan pada data yang tersedia sehingga kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen, sehingga faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan kebijakan internal pemerintah daerah belum dapat dianalisis.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi Internet Financial Reporting (IFR), antara lain dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian lebih komprehensif, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi IFR, seperti tingkat digitalisasi, kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, penggunaan metode analisis yang berbeda juga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

**REFERENSI**

- Desrina, Aprianti, S., & Dwitayanti, Y. (2024). *Analyzing the Impact of Regional Assets, Dependency, and Debt Financial Ratio on Transparency of Financial Reporting through Online Platforms in Indonesia*. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 2(04), 1209–1218.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniffa, M. H., & Rashid, H. M. A. (2005). *The determinants of voluntary disclosures in Malaysia: The case of Internet Financial Reporting*. *UNITAR E-Journal*, 2(1), 22–42.
- John W. Meyer, & Brian Rowan. (1977). *Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony*. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Paul J. DiMaggio, & Walter W. Powell. (1983). *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Setiawan, A. S., & Michael, M. (2020). Level teknologi, foreign ownership, dan implementasi *Internet Financial Reporting*. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 317-331.
- Suprianto, Edy, and Ahmad Salim. "The effect of local government wealth on Internet Financial Reporting (IFR) compliance with local geographic as a moderation variable: a new institutional theory approach." *Cogent Business & Management* 11.1 (2024): 2382921.
- Wardhanie, N. S. (2012). Analisis *Internet Financial Reporting Index*; Studi Komparasi Antara Perusahaan High-tech dan Non High-tech di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 2(2).